

Aktualisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Daerah untuk Menciptakan Integrasi Bangsa Indonesia yang Berbudi Luhur

Nasron¹, Anang Pauji Utama², Bayu Setiawan³

¹Universitas Pertahanan Bogor ; albertusnaibah@gmail.com

²Universitas Pertahanan Bogor ; anangpu19@gmail.com

³Universitas Pertahanan Bogor ; bayu.setiawan1961@gmail.com

JSTAF :

Siddiq, Tabligh, Amanah,
Fathonah

Vol 1 No 2 July 2022

Hal : 135 - 144

<https://doi.org/10.62515/staf.v1i2.54>

Received: 9 January 2022
Accepted: 10 January 2022
Published: 31 July 2022

Publisher's Note: Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC
BY) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Abstract :

The purpose of this study is to find out that Indonesia is one of the nation states that has a diverse social diversity of society. As a large unitary state, Indonesia requires special attention to development issues. Regional autonomy has encouraged regional development based on the participation of regional communities and the values of local wisdom. This paper aims to describe how to actualize the values of local wisdom in regional development in order to create the integrity of a virtuous nation. This research is a qualitative research with data collection using literature review. The results of this study show that regional development is part of Indonesia's national development. In addition, the actualization of the value of local wisdom in one region with another can have similarities can also be different. Furthermore, this study shows that there is a link between local wisdom, development and aspects of security defense, especially on peace issues and conflict resolution.

Keywords : Local Wisdom, Regional Autonomy, National Integrity, Participatory

Abstrak :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwasannya Indonesia menjadi salah satu negara bangsa yang memiliki keanekaragaman sosial masyarakat yang beraneka ragam. Sebagai negara kesatuan yang besar, Indonesia memerlukan perhatian khusus pada masalah pembangunan. Otonomi daerah telah mendorong pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat daerah dan nilai-nilai kearifan lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan

bagaimana aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah demi menciptakan integritas bangsa yang berbudi luhur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional Indonesia. Selain itu aktualisasi nilai kearifan lokal pada satu daerah dengan daerah lainnya bisa memiliki kemiripan bisa juga berbeda. Lebih lanjut penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya keterkaitan antara

kearifan lokal, pembangunan dan aspek pertahanan keamanan khususnya pada masalah perdamaian dan resolusi konflik.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Otonomi Daerah, Integritas Bangsa, Partisipasi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang tidak hanya memiliki banyak pulau tetapi juga dari segi wilayah dan penduduknya. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar tersebut, Indonesia terbagi atas daerah dan provinsi yang memiliki pemerintahan untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Gagasan pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998 yaitu Otonomi Daerah yang kemudian didukung oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya otonomi daerah ini terkait dengan adanya gagasan desentralisasi karena pemerintahan yang sentralistik dianggap belum berjalan maksimal (Fadjar, 1985).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada perkembangannya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berbeda dengan pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan adanya otonomi daerah maka memberikan ruang yang lebih luas bagi DPRD sebagai lembaga legislatif dan kepada daerah sebagai lembaga eksekutif. Selain itu dengan adanya otonomi daerah ini juga berdampak pada semakin terbukanya informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah (Anggraeni, L., dkk, 2016). Selain keberhasilan, adanya juga tantangan bagi pelaksanaan pembangunan daerah seperti munculnya raja-raja kecil di daerah, banyaknya kasus korupsi kepala daerah hingga potensi konflik di daerah yang menjadikan pembangunan di daerah menjadi terhambat.

Baedowi (2015) menyatakan Pembangunan daerah membutuhkan seluruh komponen bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum di mana kekuatan rakyat sangat kuat dan menentukan kemajuan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat daerah. Permasalahan yang terjadi kemudian adalah pembangunan daerah yang ada

seringkali melupakan kearifan lokal sebagai hasil kebudayaan masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana aktualisasi kearifan lokal dalam pembangunan daerah dapat dilakukan demi tercapainya integritas bangsa Indonesia yang berbudi luhur.

Bahan dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dalam konteks sosial. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian hingga penarikan kesimpulan.

Diskusi/Pembahasan

1. Pembangunan Daerah sebagai Bagian dari Pembangunan Nasional Indonesia

Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah untuk merencanakan dan melakukan pembangunan daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Namun pembangunan daerah ini tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari pembangunan nasional tetapi justru sebagai bagian dan menopang pembangunan nasional Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, pembangunan berusaha untuk mendekatkan dan melibatkan masyarakat sehingga lebih aktif. Melalui partisipasi masyarakat ini, pembangunan daerah membutuhkan nilai, norma maupun kebiasaan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini dilakukan sehingga pembangunan dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali dan meminimalisir kesenjangan antar daerah (Dewi, 2020).

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan menjadi salah satu isu strategis pembangunan nasional yang penting untuk digaribawahi. Posisi geografis yang strategis menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat dengan sepuluh negara tetangga. Pada perbatasan laut, Indonesia berbatasan langsung dengan India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Timor

Leste dan Australia. Di sisi lain pada perbatasan darat, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Kondisi dan posisi geografis yang dimiliki bukan hanya memberikan peluang besar tetapi juga menunjukkan adanya berbagai macam tantangan daerah dalam ranah NKRI (Lalu et al., 2017) .

Pembangunan daerah dan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan strategis yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan nasional Indonesia perlu menyesuaikan kepentingan nasional dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sebagai sebuah negara, Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, memiliki hak berdaulat di luar wilayah kedaulatan hingga kewenangan tertentu lain untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional.

Di sisi lain, dalam isu strategis pembangunan nasional terkait mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan daerah sangat diperlukan khususnya di wilayah perbatasan maupun wilayah yang rentan perpecahan. Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat dimana basis pemerataan yang telah diidentifikasi utamanya adalah daerah tertinggal, daerah transmigrasi, kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai kawasan strategis kabupaten dan kawasan perbatasan (Herlan et al., 2020). Pemerataan pembangunan nasional ini sangat penting diselesaikan karena berbagai masalah yang terjadi di wilayah perbatasan beberapa diantaranya seperti kurangnya infrastruktur pendukung, belum berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi, belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia hingga kesenjangan dengan negara tetangga.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu masalah pembangunan nasional adalah kesenjangan dalam pembangunan daerah. Kesenjangan antara wilayah menjadi isu strategis yang ditandai dengan keterbatasan sarana prasarana, aksesibilitas dan belum optimalnya pengembangan ekonomi serta sumber daya manusia di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan. Secara umum menurut Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019, arah

kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 akan fokus pada salah satunya pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Pembangunan daerah di daerah tertinggal dan perbatasan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi wilayahnya. Sebagai contoh pembangunan daerah di Maluku dilakukan dengan strategi mengembangkan komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan utama seperti pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) termasuk KI Teluk Weda, DPP/KEK Morotai. Pembangunan daerah dengan potensi daerahnya juga dilakukan di Papua dengan proyek utamanya terdiri atas (1) Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan Kota Baru Sorong sebagai penunjang PKSN Raja Ampat dan KEK Sorong serta pusat pembangunan berbasis jasa ekosistem; (2) Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Jayapura dan Merauke, termasuk ekonomi kawasan disekitarnya; (3) Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal Wilayah Adat Laa Pago di Papua dan Domberay di Papua Barat.

2. Aktualisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Daerah

Aktualisasi kearifan lokal dalam pembangunan daerah demi integritas bangsa tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut Friedman dalam jurnal penelitian Mus (2016) terdapat delapan prasyarat pemberdayaan masyarakat lokal tersebut yaitu (a) ruang hidup yang memadai, (b) pengelompokan sosial, (c) keikutsertaan dalam jaringan sosial, (d) alokasi waktu yang mencukupi, (e) penguasaan informasi, (f) peralatan produksi, (g) keterampilan, dan (h) akses terhadap sumber finansial. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan daerah tidak hanya mencakup pembangunan berdasarkan otonomi daerah dalam lingkup pemerintahan daerah seperti provinsi tetapi juga pembangunan daerah dalam lingkup yang lebih kecil seperti desa.

Salah satu contoh bagaimana kearifan lokal digunakan dalam pembangunan daerah terjadi pada pemerintahan desa di Kabupaten Konawe yaitu budaya “samaturu” “medulu ronga mepokoo’aso”. Menurut historisnya, kearifan lokal menjadi instrumen Desa Lalonggasumeeto yang berfungsi sebagai landasan dasar dari keseluruhan sistem sosial budaya masyarakat Tolaki seperti pendidikan, normal, hukum dan aturan lainnya. Dalam jurnal penelitian Herlan et al. (2020) disebutkan bahwa budaya mepokoo’aso berfokus pada kegiatan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnal ini juga menyebut bahwa masyarakat di Desa Lalonggasumeeto mengedepankan musyawarah dalam mengatasi setiap persoalan yang ada.

Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal kerja sama juga diterapkan pada pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa dengan budaya Mapalus. Kearifan lokal ini berfokus pada kegiatan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga secara langsung menjunjung tinggi keharmonisan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maarif et al., (2013) masyarakat di Desa Temboan Kabupaten Minahasa mengutamakan musyawarah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Nilai-nilai kearifan lokal kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam budaya Mapalus ini dikembangkan dalam pembangunan seperti pertanian maupun kehidupan bermasyarakat seperti kedukaan hingga bedah rumah.

Dalam masalah pembangunan, kearifan lokal juga digunakan sebagai sarana dan target pembangunan komunitas seperti yang terjadi pada komunitas Ammatoa. Menurut penelitian Maarif et al., (2013) menyebutkan bahwa pengembangan wawasan kebangsaan yang menyertakan kearifan lokal telah menjadi respon terhadap situasi baru dalam orientasi pembangunan yang muncul pada masa reformasi. Prinsip pembangunan komunitas atau community building dianggap lebih efektif dengan mengikutsertakan kearifan lokal dalam pengembangan wawasan dan pembangunan nasional. Pembangunan dengan pendekatan pembangunan komunitas tersebut perlu mendasari dengan adanya artikulasi nilai kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang di komunitas lokal.

Praktik aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal juga digunakan dalam pembangunan nagari di Canduang Koto Laweh. Dewi (2020) menyebutkan bahwa pembangunan

nagari di Canduang Koto Laweh menggunakan nilai kearifan lokal yaitu nilai kepemimpinan, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan dan nilai ekonomi. Pada nilai kepemimpinan misalnya, pengambilan keputusan dan pembentukan kepengurusan berdasarkan pada “tungku tigo sajarangan (niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai.” Dalam hal ini, adanya keikutsertaan tokoh masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembangunan nagari juga mengenal nilai partisipasi masyarakat seperti gotong royong dan musyawarah.

Aktualisasi kearifan lokal dalam pembangunan daerah demi integritas bangsa juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan damai dalam masyarakat. Pada masyarakat di Pulau Taliabu Maluku Utara misalnya, nilai-nilai kearifan lokal menjadi salah satu nilai penting yang dilestarikan oleh masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman baik ras, agama, suku, golongan, asal usul dan sebagainya. Masyarakat yang harmonis terlihat dari interaksi antara masyarakat beragama Kristen dan Islam yang ada di Taliabu. Dalam jurnal penelitiannya, Aliong Mus menyebutkan selama tidak menyangkut keimanan, masyarakat lokal seringkali mengundang masyarakat yang Muslim ke acara tertentu dalam ritual mereka dan hidangan khusus halal juga tersedia.

Integritas bangsa Indonesia tidak luput dari pembangunan untuk rakyat Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai luhur perdamaian. Selain toleransi, kearifan lokal dalam pembangunan daerah juga tercermin dalam Pill Pesinggiri dan Muakhi masyarakat Lampung. Menurut jurnal penelitian Ruslan (2018), jika kedua kearifan lokal ini dipahami dan diaktualisasikan maka bisa menjadi solusi alternatif untuk menghindari munculnya konflik dalam masyarakat. Kearifan lokal sebagai media resolusi konflik pada masyarakat Lampung tidak terlepas dari keberagaman masyarakat yang ada berpotensi menimbulkan perpecahan sehingga dapat mengganggu pembangunan yang ada. Nilai luhur dan universal dalam kearifan lokal Pill Pesenggiri dan Muakhi masyarakat Lampung dianggap oleh Idrus Ruslan memiliki signifikansi dikembangkan dalam lokus pemikiran seluruh masyarakat Lampung.

3. Kearifan Lokal, Pembangunan dan Aspek Pertahanan-Keamanan Indonesia

Pada beberapa tahun terakhir, diskusi terkait kearifan lokal semakin menguat seiring adanya kesadaran pada optimalisasi potensi dan pengetahuan lokal dalam pembangunan daerah. Ily (2015) menyebutkan jika diskusi mengenai kearifan lokal bisa menjadi ranjau sehingga tidak produktif dan strategis dalam menjawab permasalahan masyarakat jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Salah satu ranjau adalah anggapan bahwa cakupan kearifan lokal ini hanya bersifat lokal. Keterikatan pada kelokalan memberikan pesan bahwa adopsi kearifan lokal dari suatu komunitas terhadap komunitas lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini dikarenakan bagaimanapun setiap komunitas memiliki nilai dan struktur budaya yang khas sehingga adopsi nilai dari komunitas lain tersebut belum tentu sesuai dengan permasalahan di komunitas lain.

Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan daerah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat daerah tersebut. Budaya masyarakat yang terus dipertahankan secara turun temurun akan membentuk suatu perilaku yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungannya. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah menjadi kebijakan yang berasal dari proses politik di Indonesia. Oleh karena itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, pembangunan juga tidak harus menitikberatkan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan daerah.

Pembangunan merupakan masalah yang multidimensional sehingga pendekatannya tidak cukup dengan mengedepankan aspek sosial masyarakat saja. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sebagai negara kepulauan pembangunan daerah maupun nasional di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kedaulatan dan integritas bangsa. Sebagai negara kesatuan, setiap daerah di Indonesia rentan terhadap perpecahan maupun masalah pembangunan lainnya. Realisasi program agenda pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang luas sehingga perlu menjaga kesatuannya sebagai sebuah bangsa. Selain itu, realisasi dalam agenda pembangunan perlu juga mempertimbangkan pendekatan dalam aspek

pertahanan dan keamanan tanpa menghilangkan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan beberapa contoh kearifan lokal yang berkontribusi menjunjung nilai-nilai perdamaian dan resolusi konflik. Meskipun setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokalnya masing-masing, secara historis berbagai faktor telah mendorong persatuan seperti yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya kesadaran sebagai satu bangsa, pembangunan daerah yang mempertahankan nilai-nilai luhur diharapkan dapat saling memacu sehingga tidak ada lagi masyarakat dan daerah yang tertinggal seperti yang dicita-citakan sejak Indonesia merdeka.

Kesimpulan

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan paradigma yang berwawasan lokal sehingga pembangunan tetap mempertimbangkan pelestarian budaya daerah. Pembangunan daerah melalui pengembangan nilai-nilai perdamaian sesuai dengan kearifan lokal pada dasarnya merupakan bagian dari integritas bangsa Indonesia. Pembangunan daerah bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri tetapi menyatu sebagai pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Upaya desentralisasi di Indonesia telah memberikan ruang bagi penyelenggaraan pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan budaya lokal masing-masing daerah.

Kearifan lokal merupakan dasar dari pengetahuan yang menyeimbangkan kehidupan manusia dan alam. Oleh karena itu pengetahuan yang diserap dari pengalaman berhubungan dengan budaya dalam suatu komunitas. Sebagai sebuah negara bangsa yang terdiri dari banyak budaya, Indonesia memiliki kearifan lokal yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kearifan lokal antara satu daerah yang satu dengan daerah lainnya dapat berbeda, namun berasal dari nilai luhur masyarakatnya yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional tidak dapat terlepas dari upaya pemenuhan kesejahteraan

segenap bangsa Indonesia dengan mempertahankan Indonesia sebagai sebuah kesatuan.

Referensi

- * L. Q. dan L. A. (2015). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 10–20. <https://doi.org/10.21831/socia.v10i1.5338>
- Anggraeni, L., Affandi, I., & Suryadi, K. (2016). Local wisdom-based service Learning in tourism Hetitage,. *Heritage, Culture and Society: Research Agenda and Best Practices in the Hospitality and Tourism Industry*, 279.
- Baedowi, A. (2015). *Calak Edu 4: Esai-esai Pendidikan 2012-2014: Vol. (vol 4*. Pustaka Alvabet.
- Fadjar, A. H. dan. (1985). *Di Sekitar Kehidupan Harmonis Manusia Jawa*. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia.
- Fanny Afri Dewi, F. fatmariza. (2020). eaktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Nagari. *Journal of Civic Education*, Vol 3 No 3. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3029241>
- Herlan, H., Taena, L., & Aso, L. (2020). Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 81–91. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.726>
- Lalu, C. L., Kimbal, M., & Pangemanan, S. (2017). Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Maarif, S., Azis, A., & Setiani, P. (2013). Pembangunan Nasional: Kearifan Lokal sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(3), 167–181. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkp5e930c418cfull.pdf>
- Mus, A. (2016). Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu: Potensi dan Aktualisasinya bagi Pembangunan Daerah. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan*, 3(1), 58–7.
- Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. In *Kalam* (Vol. 12, Issue 1, pp. 105–126). <https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347>